

TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN,
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

*THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, IMPLEMENTATION, QUALITY
OF HUMAN RESOURCES AND SUPERVISION OF BUDGET
ABSORPTION IN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU*

**FAUZIAH
A042192026**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN,
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

***THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, IMPLEMENTATION, QUALITY
OF HUMAN RESOURCES AND SUPERVISION OF BUDGET
ABSORPTION IN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**FAUZIAH
A042192026**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN,
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU**

***THE EFFECT OF BUDGET PLANNING, IMPLEMENTATION, QUALITY
OF HUMAN RESOURCES AND SUPERVISION OF BUDGET
ABSORPTION IN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU***

disusun dan diajukan oleh

**FAUZIAH
A042192026**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 20 Januari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001


Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196604051992032003

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001


Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAUZIAH

NIM : A042192026

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar,

2022

Yang menyatakan,



FAUZIAH

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan jauh dari sempurna serta banyak memberikan pengetahuan dan pendalaman bagi peneliti. Untuk itu, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga atas bantuan, dorongan, bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak sampai selesainya tesis ini utamanya kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, dan **Dr. Andi Kusumawati, SE.,M.Si.,Ak.,CA** selaku pembimbing dan tim penasihat yang telah memberikan perhatian, dukungan, saran, dan meluangkan waktu untuk berdiskusi selama penyusunan tesis;
5. **Prof. Dr. Mediaty, SE., M.Si.,Ak.,CA** **Prof. Dr. Musran Munizu, SE.,M.Si, CIPM** dan **Dr. Retno Fitrianti, SE.,M.Si.** selaku penguji yang juga sangat berperan besar dalam memberikan masukan terhadap perbaikan dan penyempurnaan tesis ini;

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS yang selama kuliah telah memberikan ilmu dan berbagi pengalaman yang sangat berharga;
7. Seluruh staf Prodi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS atas segala bentuk bantuan dan kerjasama dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi penyelesaian studi;
8. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian;
9. Teman, saudara seperjuangan **Kelas MKD** atas segala bentuk kerjasama, kekompakan, serta motivasi dalam proses perkuliahan sampai selesai masa studi;

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, Januari 2022

FAUZIAH

ABSTRAK

FAUZIAH. *Pengaruh Perencanaan Anggaran , Pelaksanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengawasan terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (dibimbing oleh Abd. Rahman Kadir dan Kusumawati).*

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh perencanaan, pelaksanaan, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan terhadap penyerapan anggaran.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data berupa data primer. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Populasi sebanyak 621 orang pegawai. Sampel sebanyak 34 kepala satuan perangkat kerja daerah yang terdiri atas Kepala Bagian Keuangan, Kepala Bagian Perencanaan, dan Bendahara Pengeluaran. Data dianalisis menggunakan SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran; pelaksanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran; kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran; dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan, penyerapan anggaran



ABSTRACT

FAUZIAH. *The Effect of Budget Planning, Implementation, Quality of Human Resources, and Supervision on Budget Absorption on Regional Organizations of Mamuju Regency* (supervised by **Abd Rahman Kadir** and **Kusumawati**)

The aim of this study is to determine the effect of planning, implementation, quality of human resources, and supervision on budget absorption.

This research was a quantitative descriptive study using primary data obtained with a questionnaire. The population were 621 employees consisting of 34 units of heads of departments, agencies, and sections selected using sample criteria involving the head of the regional work unit, the head of the financial division of the regional work unit, the head of the planning section of the regional work unit, and the treasurer of the expenditure of regional work unit as many as 43 people. The data were analyzed using SPSS 25.

The results show that budget planning has a significant positive effect on budget absorption; budget execution has a significant positive effect on budget absorption; the quality of human resources has a significant positive effect on budget absorption, and supervision has no significant effect on budget absorption.

Keywords: planning, implementation, quality of human resources, supervision, budget absorption



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kegunaan Penelitian	13
1.4.1 Kegunaan Teoritis	13
1.4.2 Kegunaan Praktis	14
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	17
2.1.1 <i>Grand Theory</i>	17
2.1.2 Anggaran Publik	18
2.1.3 Perencanaan Anggaran	22
2.1.4 Pelaksanaan Anggaran	24
2.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia	28
2.1.6 Pengawasan	32

2.1.7 Penyerapan Anggaran.....	35
2.2 Tinjauan Empiris	37
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Konseptual	40
3.2 Hipotesis	43
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Rancangan Penelitian	45
4.2 Lokasi dan Waktu penelitian	45
4.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	45
4.4 Jenis dan Sumber Data	48
4.5 Populasi dan Sampel.....	48
4.6 Metode Pengumpulan Data	51
4.7 Analisis Data.....	52
BAB V HASIL PENELITIAN	
5.2 Gambaran Umum.....	59
5.2 Deskriptif Statistik	62
5.3 Uji Kuesioner	66
5.4 Asumsi Klasik.....	71
5.5 Pengujian Hipotesis	75
BAB VI PEMBAHSAN	
6.1 Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.....	80
6.2 Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran	82
6.3 Kualitas Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Penyerapan Anggaran	84
6.4 Pengawasan Berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran	85
6.5 Perencanaan, Pelaksanaan, Kualitas SDM dan Pengawasa.....	87
PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	89

7.2 Keterbatasan	90
7.3 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 2.1 Kajian Empiris	38
2. Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	47
3. Tabel 4.1 Skala <i>Likert</i>	52
4. Tabel 4.2 Interpretasi Koefisien Korelasi	56
5. Tabel 5.1 Pendistribusian Kuesioner.....	60
6. Tabel 5.2 Karakteristik Jenis Kelamin	60
7. Tabel 5.3 Karakteristik Jabatan.....	61
8. Tabel 5.4 Karakteristik Pendidikan.....	61
9. Tabel 5.5 Karakteristik Lama Kerja.....	62
10. Tabel 5.6 Tanggapan Responden Penrencanaan Anggaran	63
11. Tabel 5.7 Tanggapan Responden Pelaksanaan Anggaran.....	63
12. Tabel 5.8 Tanggapan Responden Kualitas Sumber Daya Manusia	64
13. Tabel 5.9 Tanggapan Responden Pengawasan	65
14. Tabel 5.10 Tanggapan Responden Penyerapan Anggaran.....	65
15. Tabel 5.11 Output Korelasi Perencanaan Anggaran	66
16. Tabel 5.12 Output Korelasi Pelaksanaan Anggaran	67
17. Tabel 5.13 Output Korelasi Kualitas Sumber Daya Manusia	68
18. Tabel 5.14 Output Korelasi Pengawasan	69
19. Tabel 5.15 Output Korelasi Penyerapan Anggaran.....	69
20. Tabel 5.16 Output output SPSS <i>Reliabiliy Statstic</i>	70
21. Tabel 5.17 Output output SPSS Normalitas.....	71
22. Tabel 5.18 Output output SPSS Multikolinieritas.....	73
23. Tabel 5.19 Output SPSS Uji Glejser	74
24. Tabel 5.20 Hasil Regresi Linier Berganda	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 3.1 Skema Kerangka Pikir.....	40
2. Gambar .1 Grafik Data Sebaran Residual	72
3. Gambar 5.2 Pengujian <i>Scatter Plot</i>	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan bangsa dan negara republik Indonesia yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada alinea ke empat yaitu merupakan upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan umum. Sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, maka pemerintah pusat melakukan sebuah kebijakan yang dinamakan desentralisasi, dimana pada kebijakan ini sebagai tanggung jawab pemerintah pusat untuk sebagian wewenangnya diserahkan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam suatu kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas kebijakan tersebut, maka sebagai konsikuesinya adalah pemerintah membutuhkan pembiayaan yang memadai untuk dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), serta pada saatnya harus dikeluarkan melalui Kas Negara/Daerah. Kebijakan desentralisasi pertama kali digulirkan oleh pemerintah pada akhir tahun 1999 dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah atau lebih dikenal dengan sebutan undang-undang otonomi daerah. Namun meski telah ditetapkan sejak tahun 1999, akan tetap undang-undang ini baru diterapkan pada tahun 2001.

Otonomi daerah mengamanahkan pemerintah daerah memiliki kewenangan sendiri dan keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah pusat guna mengalokasikan sumber-sumber material yang

substansial tentang fungsi-fungsi yang berbeda. Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat (Zuharisal, 2017). Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga menciptakan keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia (Syaukani, 2002).

Secara umum kebijakan desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang ada dalam wilayahnya, salah satunya yaitu desentralisasi fiskal dimana pada setiap daerah diberikan kelonggaran dalam mengelolah keuangannya masing-masing. Desentralisasi fiskal pada umumnya dapat mendorong serta meningkatkan efisiensi belanja Pemerintah daerah lebih paham atas kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat daripada Pemerintah Pusat (Haslinda, 2016).

Desentralisasi juga diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Asas otonomi memberikan keleluasaan kepada kepala daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota untuk mengelola sumber daya yang dimiliki supaya tujuan pemerintah dapat tercapai. Diciptakannya Undang-Undang tersebut agar daerah dapat diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan mampu mencapai tujuan tersebut melalui penyerapan anggaran yang maksimal karena setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi sumber daya yang dimilikinya.

Di Indonesia, kondisi yang dialami sekarang yaitu adanya perlambatan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah itu menjadi masalah yang klasik yang setiap tahunnya terjadi. Penyerapan anggaran diawal tahun yang kecil, akan tetap mengalami peningkatan yang signifikan pada akhir tahun. Kondisi tersebut, berdampak pada lambatnya realisasi pelaksanaan sebuah program kerja dan kegiatan pemerintah. Hal ini berdampak pada kegiatan pembangunan fisik untuk fasilitas umum, atas dampak keterlambatan tersebut juga mengakibatkan keterlambatan atas manfaat yang akan diperoleh dan dinikmati masyarakat, disamping buruknya kualitas barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas (Malahayati, 2015).

Jika kondisi gagal target, maka berdampak pada target penyerapan anggaran yang berdampak pada hilangnya manfaat belanja, hal ini dikarenakan dana yang disalurkan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah yang artinya ada dana yang nganggur (*idle money*). Jika pengalokasian anggaran yang efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki Negara dapat dioptimalkan dalam mendanai kegiatan yang strategis. Sumber-sumber penerimaan Negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun skala prioritas untuk kegiatan serta pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran (BPKP, 2011).

Pada pemeritahan Kabupaten Mamuju, dimana dapat dilihat pada laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tiap satuan Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2017-2019.

**Table 1.1 Realisasi APBD Kabupaten Mamuju
Tahun 2017 -2019**

No.	OPD	Penyerapan Anggaran		
		Tahun (%)		
		2017	2018	2019
1	DISDIKPORA	87,36	75,44	72,14
2	Dis KESEHATAN	86,48	93,81	96,95
3	Dis PUPR	84,92	100	89,70
4	Dis PERKIMTA	84,92	71,86	92,23
5	SATPOL PP & DAMKAR	83,59	97,71	98,13
6	Badan KESBANGPOL	83,51	97,04	94,85
7	Dis SOSIAL	61,76	96,84	94,42
8	BPBD	87,83	95,96	83,87
9	DisPP & PA	53,67	97,68	97,31
10	Dis Ketahanan Pangan	64,91	97,33	95,58
11	D L H K	93,59	90,99	102,03
12	Dis Kependudukan & Capil	93,79	97,80	98,09
13	Dis P M D	89,41	97,49	91,95
14	Dis Pengendalian Penduduk & KB	93,91	91,80	97,62
15	Dis Perhubungan	77,20	98,00	100,46
16	Dis Kominfo& Persandian	80,34	97,58	96,83
17	Dis Kop. UKM & Perindustrian	77,58	97,21	86,78
18	Dis PM – PTSP	87,96	94,80	93,90
19	Dis Perpustakaan& Kearsipan	90,47	98,51	96,15
20	Dis Kelautan& Perikanan	96,49	98,85	97,73
21	Dis Kebudayaan & Pariwisata	97,36	98,96	92,82
22	Dis Tanaman Pangan & Holtikultura	93,85	98,92	93,11
23	Dis Perkebunan	84,93	97,60	95,90
24	Dis Perdagangan	86,81	97,95	97,31
25	Dis Transmigrasi & Tenaga Kerja	89,43	98,68	97,52
26	Sekretariat Dewan	85,48	99,08	95,50
27	Sekretariat Daerah	88,26	97,08	96,67
28	Kepala dan Wakil Daerah	95,34	99,51	96,52
29	Inspektorat	-	96,08	98,23
30	BAPPEPAN	84,02	95,06	94,70
31	BAPENDA	123,92	104,42	93,20
32	P P K D	92,06	94,54	-
33	BPKAD	(606,66)	126,60	100
34	BKPP	85,49	94,70	95,75

Sumber : Pemerintah Kabupaten Mamuju

Berdasarkan fenomena diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju tidak konsisten, karena masih ada terdapat dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian dihadapkan pada kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Oleh sebab itu ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Permasalahan yang ada pada sisten perencanaan anggaran pada pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, dimana para perencanaan SKPD dalam menyusun RKA tidak menentukan skala prioritas yang dapat menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan anggaran atau anggaran kas pada setiap triwulannya. Adanya permasalahan pada sistem perencanaan diakibatkan karena pelaksanaan yang kurang optimal. Dari pantauan dilapangan oleh peneliti, pada pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Mamuju dirasakan masih belum optimal. Adanya kinerja keuangan daerah yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi pembengkakan kinerja keuangan pada akhir tahun.

Contoh misalnya, pada bulan juli tahun 2017 penerapan APBD yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju baru mencapai 30% dari anggaran yang ditteapkan, pada tahun anggaran akan segera berakhir, namun padahal bulan Desember peyerapan anggaran langsung mencapai 93% berrati terjadi

penumpukan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah diakhir tahun. Kemudian, untuk APBD Kabupaten Mamuju tahun 2018 serapannya pada bulan Desember mencapai 91,45% dari total APBD tahun itu sebesar Rp 1,129 Triliun (BPKAD Kabupaten Mamuju, 2019).

Pada tahun 2019 Kabupaten Mamuju memperoleh jumlah anggaran yang disahkan oleh DPRD adalah sebesar Rp. 1,175 Triliun pada bulan Desember serapan anggaran APBD Kabupaten Mamuju hanya mencapai 95% (BPKAD Kabupaten Mamuju, 2019). Salah satu faktor yang dapat menyebabkan pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan inidipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Mamuju.

Kondisi ini menarik bagi peneliti untuk mencari tahu bagaimana pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Mamuju, sudahkah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan mencapai sasaran yang efektif, bermanfaat untuk kepentingan publik serta bisa di pertanggungjawabkan. Selanjutnya untuk setiap organisasi sektor swasta maupun sektor publik diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional dan berkualitas. Dimana penerapan sistem teknologi informasi daerah mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pencairan dana membutuhkan SDM yang mampu memahami setiap pembaharuan sistem keuangan daerah sehingga penyerapan anggaran dapat tersealisasi dengan maksimal. Dan fenomena SDM di Pemerintah Kabupaten Mamuju bahwa masih banyaknya ASN yang tidak terampil dalam mengoperasikan komputer.

Faktor lain yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam memaksimalkan penyerapan anggaran adalah sistem penerapan pengawasan yang harus tepat. Fakta dilapangan, pengawasan yang dilakukan masih pada laporan realisasi fisik dan keuangan pada setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan menggunakan sistem rewiuw evaluasi penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa (PAPBJ). Dimana melalui hasil rewiu tersebut dapat diketahui penyebab masalah sehingga tidak maksimalnya penyerapan anggaran daerah dan dengan melalui pengawasan tersebut dapat memberikan solusi bagi kepala daerah dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daera) dalam pengambilan kebijakan.

Penelitian dilakukan oleh Malahayati (2015) menunjukkan bahwa kapasitas SDM, perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran berpengaruh positif baik secara simultan maupun parsial terhadap serapan anggaran dengan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banda Aceh. Penyebab rendahnya penyerapan pada tahap perencanaan biasanya karena masih menunggu pengesahan APBD Perubahan yang terlambat diterima oleh SKPD. Penyebab lainnya adalah karena adanya kesalahan menentukan jenis belanja dalam DPA sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu penyerapan anggaran juga dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan secara khusus dalam hal pengadaan barang/jasa. Terbatasnya SDM pada panitia pengadaan menyebabkan proses pelelangan harus mengikuti ketersediaan waktu tim/panitia lelang. Hal ini menyebabkan keterlambatan penetapan pemenang yang mempengaruhi penyerapan anggaran. Faktor lainnya adalah adanya keterlambatan penetapan

panitia pengadaan karena terbatasnya SDM yang telah bersertifikat dan adanya keengganan untuk mau menjadi anggota panitia/ pejabat pengadaan barang dan jasa (BPKP, 2011).

Dalam perkembangannya, maka muncul sistematisasi anggaran kinerja yang diartikan sebagai salah satu bentuk anggaran yang sumber-sumbernya dihubungkan dengan hasil dari pelayanan (Syahputra, 2010). Dengan sistem ini, maka penetapan besarnya alokasi anggaran daerah lebih mempertimbangkan nilai mata uang yang mengikuti fungsi sesuai dengan kebutuhan yang riil setiap pada unit kerja. Hal ini disebabkan, karena APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari program kebijakan serta usaha pembangunan yang ditanggung dalam bentuk aktivitas yang dimilikinya oleh unit kerja terkecil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan pada setiap tahunnya.

Menurut Halim (2014:84) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran merupakan suatu penapaian dari estimasi yang hendak ingin dicapai dalam satu periode tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah bagi orang-orang awam menyebutnya yaitu sebagai pencairan anggaran. Untuk memperbaiki penyerapan anggaran maka penting dilakukan sebuah perencanaan anggaran yang baik, pelaksanaan yang tepat sasaran, kualitas sumber daya manusia harus profesional, fungsi pengawasan harus dimaksimalkan dengan baik sehingga berdampak baik pada perbaikan dalam penyerapan anggaran pada pemerintah daerah.

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting di dalam organisasi. Perencanaan sangat menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan

untu mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran.

Menurut Munandar (2012:1) mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara teratur atau sistematis, yang terdiri dari seluruh aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka panjang (periode) tertentu dimasa yang akan datang

Sebagaimana hasil laporan Direktorat jendral Perimbangan Keuangan (2013) bahwa besar kecilnya tingkat penyerapan belanja daerah dalam mendanai pelayanan public sangat dipengaruhi oleh tingkat penyerapan anggaran. Peneliti (Muh Iqbal, 2018) membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahappengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan (BPKP, 2011). Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan dalam internal satuan perangkat kerja, serta suatu proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Pelaksanaan juga dapat mempengaruhi besar kecilnya tingkat penyerapan anggaran. Peneliti Ledy Gagola (2015) membuktikan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran adalah tingkat kualitas sumber daya manusia. (Mangkunegara, 2013) sumber daya manusia

merupakan tenaga kerja, pekerja, karyawan, pegawai atau seseorang yang memiliki potensi dan merupakan asset yang berfungsi sebagai modal non material dalam suatu organisasi, yang dapat mewujudkan menjadi potensi yang nyata baik secara fisik maupun non fisik. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berada didalamnya.

Dalam organisasi sektor publik, peran Sumber Daya Manusia (SDM) lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sehingga organisasi tetap memiliki reputasi kinerja yang unggul dan akuntabel dimata masyarakat. Oleh karenanya, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada setiap level manajemen menjadi *urgen* baik level pimpinan maupun staf pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh (Indi Zaenur Anisa, 2017) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran di lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Banten.

Menurut Fahmi (2014:65) mengemukakan bahwa hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan merupakan secara umum dapat diartikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya misi dan visi dalam suatu organisasi.

Sistem tata kelola pelaksanaan pemerintahan yang baik dari suatu Negara itu diukur berdasarkan keberhasilan dalam penyerapan anggaran. Oleh sebab itu, maka pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda Pemerintahan, salah satunya yaitu kaidah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang baik menjadi alasan pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan sistem akuntansi keuangan, pada pelaksanaan sistem ini tidak ada jaminan bahwa terdapat kesalahan atau penyimpangan sehingga diperlukan sebuah bentuk pengawasan yang memadai dari atasan secara langsung terhadap bawahannya.

Pengawasan inilah yang dapat memberikan bantuan agar dapat memverifikasi transaksi-transaksi sehingga dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, kemudian dilakukan pengecekan pada otoritas, efisiensi dan keabsahan pembelajaran dana. Oleh karena itu, pemerintah perlu memiliki sistem akuntansi yang bukan hanya berfungsi sebagai alat pendengalian transaksi keuangan saja, namun juga berfungsi sebagai suatu sistem akuntansi keuangan yang hendaknya mendukung pada pencapaian kinerja (penyerapan anggaran).

Menurut Sukmana dan Anggarsari (2009:45) mengemukakan bahwa salah satu bentuk penilaian yang baik dapat dilihat yaitu dari hasil capaian penyerapan anggaran itu sendiri. Pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manager dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju?
2. Apakah pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamuju?
4. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamuju?
5. Apakah perencanaan, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamuju?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan berpengaruh terhadap anggaran pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberikan sumbangan pemikiran atas pengembangan ilmu pengetahuan baik secara umum pada bidang ilmu keuangan daerah dan kemudian secara khusus pada bidang sektor publik (anggaran/keuangan).
2. Memberikan tambahan informasi kepada penelitian dibidang keuangan daerah yang menyangkut dengan sektor publik pada khususnya mengenai topik

perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia, pengawasan serta penyerapan anggaran

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang penelitian seperti mulai dari proses pengumpulan data, pengolahan data, sampai dengan penyajian dalam bentuk karya ilmiah.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Mamuju, yaitu dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai masukan atau sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam peningkatan penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Bagi akademik, yaitu dari hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai bahan kajian serta referensi pada penelitian selanjutnya yang dilakukan dengan topic yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian ini yaitu dilakukan pada 34 Organisasi perangkat Daerah pada ruang lingkup pemerintahan Kabupaten Mamuju dengan memfokuskan penelitian ini di pegawai yang terlibat secara langsung pada pengelolaan anggaran/keuangan seperti kepala SKPD, Kepala Bidang Keuangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian serta sistematika penulisan. Pada bab ini berisikan

tentang tinjauan yang secara umum perencanaan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

- Bab II : Tinjauan Pustaka, pada bab ini menjelaskan tentang teori dan konsep serta tinjauan empiris. Pada bab ini menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Peneliti melakukan kajian dari berbagai sumber referensi seperti teori yang dikemukakan para ahli, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang dapat menghasilkan sebuah hipotesis kemudian digambarkan pada kerangka pikir tentang alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.
- Bab III : Kerangka Konseptual dan Hipotesis, pada bab ini menjelaskan tentang kerangka konseptual serta hipotesis pada penelitian ini, kemudian pada bab ini juga dijelaskan bagaimana proses pembuatan hipotesis berdasarkan dengan konsep.
- Bab IV : Metode Penelitian, pada bab ini dijelaskan terkait dengan rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi, sampel. Teknik pengambilan sampel, sumber data, pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta teknis analisis data. Pada bab ini menjelaskan tentang proses pengolahan data sampai dengan penggunaan alat ukur yang dipakai oleh peneliti.
- Bab V : Hasil Penelitian, pada bab ini menjelaskan deskripsi data dan penelitian yang diperoleh oleh peneliti melalui metode serta

prosedur yang ditetapkan melalui metodologi penelitian seperti pemaparan data yang disajikan dengan topic sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian serta hasil pengolahan data.

- Bab VI : Pembahasan, pada bab ini diejelaskan serta membahas hasil dari analisis data penelitian sebagai dsar untuk menarik sebuah kesimpulan.
- Bab VII : Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan, implikasi, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tinjauan Pustaka

2.1.1 *Grand Theory*

Grand theory dalam penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *stewardship theory*. Teori *Stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik.

Berdasarkan asumsi teori *stewardship* yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau steward dan pemilik atau prinsipal berasal dari organisasi yang kuat dan juga secara ekonomi.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah manfaatnya ke teori *stewardship* yaitu informasi lebih berkualitas, berdasarkan teori ada hubungan positif antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan teori *stewardship*. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi

keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut Wahidah (2015) menyatakan bahwa implikasi dari teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, mampu membuat pertanggungjawaban keuangan, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Objek penelitian ini adalah bagian dari organisasi sektor publik yaitu pemerintah daerah. Penelitian ini akan menguji efek pembelajaran teori *stewardship* terhadap perencanaan, pelaksanaan, kualitas sumber daya manusia, pengawasan dan dampaknya terhadap penyerapan anggaran.

2.1.2 Anggaran Publik

Anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam uang untuk jangka waktu tertentu (Sinambela, 2014)

Menurut Munandar (2012:1) mengemukakan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara teratur atau sistematis, yang terdiri dari seluruh aktivitas perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka panjang (periode) tertentu dimasa yang akan datang. Selanjutnya Nafarin (2016:9) mengemukakan bahwa sebuah rencana secara tertulis mengenai

suatu kegiatan organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan uang jangka waktu yang tertentu.

Menurut Mardiasmo (2009:80) anggaran sektor publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan atau disebut juga dengan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional pemerintah. Anggaran tentu sangat diperlukan agar dapat meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, serta diperuntukkan sebagai alat pengendalian, perencanaan, alat politik, koordinasi, alat kebijakan fiskal, alat penilaian kinerja, alat komunikasi, alat motivasi dan menciptakan ruang publik dan diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan berkembang, sedangkan sumber daya yang terbatas.

Menurut Sujarweni (2015:53) Anggaran sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pimpinan organisasi untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan organisasi kepada bawahannya atau instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang publik anggaran menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi sektor publik yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Isi dari anggaran adalah rencana kegiatan dalam suatu periode yang direpresentasikan dalam bentuk

rencana pendapatan dan belanja. Anggaran juga berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (Permanasari, 2014:21).

Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Pasal 1 Ayat 9) tentang Pedoman Pelaksanaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, pemerintah daerah harus terlebih menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 (Pasal 16), APBD memiliki fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi otoritas, anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan, anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggara pemeritahan daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
4. Fungsi alokasi, anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.

5. Fungsi distribusi, kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
6. Fungsi stabilisasi, anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Menurut Mardiasmo (2009:71) dalam bukunya akuntansi sektor publik anggaran sektor publik terdapat beberapa fungsi utama, terdiri dari :

1. Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran sektor publik ini dibuat untuk merencanakan sebuah tindakan apa yang akan dilakukan oleh sektor publik dari belanja perusahaan tersebut.

2. Sebagai alat pengendalian (*Control Tool*)

Sebagai instrument dalam pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya masuk dalam alokasi anggaran pada bidang lain yang tidak terdapat sebagai prioritas.

3. Sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Digunakan agar dapat menstabilkan kondisi ekonomi dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran ini dapat diketahui arah kebijakan fiskal oleh pemerintah sehingga dapat dilakukan sebuah prediksi atau ramalan dan estimasi ekonomi.

4. Sebagai alat dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran publik adalah sebagai alat untuk melaksanakan koordinasi antar bagian dalam pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan

mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi dalam satuan perangkat atau unit kerja dalam mencapai suatu tujuan organisasi.

5. Sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder (eksekutif)* kepada pemberi wewenang (*legistaif*), kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan capaian anggaran serta efesiensi dalam pelaksanaan anggaran. Kinerja pimpinan publik akan dinilai dengan berapa yang sukses dicapai kemudian dikaitkan dengan anggaran yang telah disiapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif dalam pengendalian serta penilaian kinerja

6. Sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong semangat motivasi pimpinan dan bawahannya secara efektif, ekonomis, serta efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang ingin dicapai.

2.1.3 Perencanaan Anggaran

2.1.3.1 Pengertian Perencanaan Anggran

Perencanaan merupakan unsur penting di dalam organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Untuk merealisasikan perencanaan dibutuhkan anggaran (L. Gagola et al., 2017)

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masadepan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Ramdhani & Anisa, 2017). Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya terutama

berpedoman pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan dimasa mendatang. Perencanaan

Dalam rangka penyiapan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyusun arah dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan APBD. Tolak ukur yang digunakan dalam melihat kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan melihat besarnya porsi/kontribusi terhadap APBD. APBD berdasarkan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dapat diartikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek daerah dalam setahun anggaran tertentu dan dipihak yang lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber suatu penerimaan daerah dalam menutupi pengeluaran-pengeluaran.

Perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintah, maka penyusunannya terutama berpedoman pada UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk melaksanakan pembangunan pemerintah telah merencanakan target-target pembangunan dimasa mendatang (Anisa, 2017).

2.1.3.2 Proses Perencanaan Anggaran

Menurut Sukarna (2011:39) anggaran daerah disusun berdasarkan dengan pendekatan kinerja, yaitu sistem anggaran yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Proses perencanaan anggaran pada sektor publik terdiri dari :

1. Tahap persiapan

Anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia.

2. Tahap ratifikasi

Pengesahan rencana anggaran yang dilakukan badan eksekutif dan badan legislatif agar menjadi anggaran final.

3. Tahap implementasi

Dimilikinya system informasi akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati sebelumnya.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi.

Jika tahap implementasi telah didukung dengan system akuntansi dengan system pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi akan menemukan banyak masalah.

2.1.4 Pelaksanaan Anggaran

2.1.4.1 Pengertian Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai (Ramdhani & Anisa, 2017). Pelaksanaan anggaran merupakan suatu aktivitas atau usaha yang

dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan telah ditetapkan (BPKP,2010). Proses pelaksanaan meliputi pengaturan atas penggunaan alat-alat yang diperlukan, bagaimana cara melaksanakannya dan dimana tempat pelaksanaannya.

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan di tetapkan (Anisa, 2017)

Pelaksanaan anggaran adalah tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Pelaksanaan Anggaran dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPASKPD) ditetapkan oleh PPKD dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 penyusunan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD harus diberitahukan kepada semua Kepala SKPD oleh pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan (Patiran & Bonsapia, 2018)

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran adalah merupakan suatu upaya-upaya yang dilakukan agar dapat merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat.

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Anggaran

(Riyanto, 2012:36) faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan anggaran yang memiliki dampak baik dan buruk dalam penyerapan anggaran sebagai berikut:

1. Persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja

Persoalan yang sering timbul di dalam internal satuan kerja, semestinya dapat diminimalisir jika satuan kerja melaksanakan pengolahan manajemen yang sangat baik atau efektif. Masalah yang dihadapi di internal satuan kerja misalnya :keterlambatan pendapatan surat keputusan tenaga pengelola keuangan, tidak adanya reward dan *punishment*, serta kebiasaan menunda pekerjaan.

2. Pengadaan barang dan jasa

Dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa diperlukan pembentukan Unit Layanan Pengadaan (UPL) sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Adapun pihak yang dilibatkan dalam proses pengadaan barang dan jasa dari pejabat pengadaan seperti personil yang dipilih dalam melakukan pengadaan langsung dan pihak penyedia barang dan jasa baik oerang atau perorangan ataupun badan usaha yang mneyediakan barang dan jasa, konstruksi jasa konsultasi dan jasa lainnya. Seseorang yang berda dalam lingkup pengadaan harus mmeiliki sertifikat keahlian dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Hasil penelitian (Siswanto dan Rahayu, 2010) menunjukkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa disebabkan oleh :

- a. Spesifikasi teknis barang/jasa tidak ada/tidak jelas
 - b. Buruknya proses pengadaan barang/jsa satuan kerja
 - c. Banyaknya sanggahan dalam proses lelang
 - d. Banyaknya pengaduan LSM mengenai pengadaan barang/jasa ke Polri dan Kejaksaan
 - e. Kurangnya sosialisasi mekanisme pengadaan barang/jasa
 - f. Kurangnya panitia pengadaan yang bersertifikat
 - g. Ketidakharmonisan peraturan perundang-undangan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pencairan anggaran
 - h. Tidak seimbangnya resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima oleh pejabat pelaksana pengadaan
 - i. Kehati-hatian pejabat pengadaan barang/jasa mengambil tindakan.
3. Mekanisme pembayaran (pencairan anggaran).

Dalam pencairan dana pengeluaran negara dikenal 2(dua) mekanisme pembayaran, yaitu mekanisme pembayaran langsung kepada pihak ketiga (LS) dan melalui Uang Persediaan (UP). Mekanisme LS menyalurkan pencairan dana dari Bendahara Umum Negara (BUN) kepada pihak ketiga sebagai penerima hak tagih kepada negara atas prestasi/kemajuan pekerjaan yang telah diselesaikan dari pemberi pekerjaan (Kementerian/satuan kerja (satker). Mekanisme UP yaitu melakukan pembayaran kepada penerima hak tagih melalui bendahara pengeluaran masing-masing satker. Dalam hal penggunaan mekanisme UP, bendahara pengeluaran terlebih dahulu mengajukan permintaan uang muka kerja (UP) kepada Kuasa BUN (KPPN)

2.1.5 Kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Sumber Daya Manusia

Kunci keberhasilan suatu organisasi dalam usaha pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh kemampuan serta keterampilan pegawainya disamping kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan bawahan atau pegawai dari pimpinan organisasi itu sendiri. Pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan menjadikan kompetensi menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan organisasi atau perusahaan (Rahmawati et al., 2021)

Pengembangan SDM pada intinya diarahkan untuk meningkatkan kualitas, yang padagilirannya dapat meningkatkan produktivitas. Hasil berbagai studi menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor penentu produktivitas, baik secara makro maupun mikro (Ramdhani & Anisa, 2017).

Manusia (SDM) secara makro adalah warga Negara yang telah memasuki usia angkatan kerja yang memiliki potensi untuk berperilaku produktif (dengan atau tanpa berpendidikan formal) yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan keluarganya, yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat di lingkungan bangsa atau negaranya

Menurut Mngkunegara (2013:2) sumber daya manusia merupakan tenaga kerja, pekerja, karyawan, pegawai atau seseorang yang memiliki potensi dan merupakan asset yang berfungsi sebagai modal non material dalam suatu organisasi, yang dapat mewujudkan menjadi potensi yang nyata baik secara fisik maupun non fisik.

Menurut Suharto (2012:34) mendefinisikan kualitas sumber daya manusia sebagai kemampuan dari pegawai dalam menjalankan tugasnya dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan profesionalisme dalam bekerja.

Menurut Desseler (2015:3) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan.

Menurut Hasibuan (2012:2) manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu dan seni dalam mengatur proses hubungan dan proses tenaga kerja agar efektif dan efisien serta membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat.

Menurut Sutrisno (2010:22) apabila sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikan system akuntansi tidak memiliki kualitas yang diharapkan, maka akan lahir masalah atau hambatan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi dan kemudian akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari system akuntansi kualitasnya akan menjadi buru. Informasi yang dihasilkan yang kemudian menjadi informasi yang kurang baik atau tidak memiliki nilai seperti keandalan. Selain ini, pegawai yang memiliki pemahaman yang rendah atas tugas dan fungsinya, serta hambatan yang ditemukan dalam pengolahan data juga akan berdampak pada penyajian pelaporan keuangan

Berdasarkan hasil uraian para ahli maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah menyangkut pada manusia yang memiliki

kemampuan dalam bekerja dalam memberikan pelayanan jasa atau usaha kerja. Mampu bekerja artinya mampu melaksanakan kegiatan yang memiliki nilai ekonomis yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

2.1.5.2 Fungsi Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut (Rahmawati et al., 2021) fungsi sumber daya manusia merupakan fungsi manajemen dengan penerapan di bidang sumber daya manusia agar organisasi mampu bertanggung jawab baik secara social, etis atas kebutuhan ataupun tantangan masyarakat, serta dapat meminimalisir dampak negative atas tuntutan pada organisasi.

Menurut Herlambang (2013:19) manajemen juga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia yaitu sebagai fungsi manajemen dan fungsi operasional :

1. Fungsi Manajemen

Perencanaan merupakan merencanakan sumber daya manusia untuk bekerja secara efektif dan efisien agar sesuai dengan kebutuhan perubahan dalam membantu mencapai tujuan. Perencanaan ini dilaksanakan dengan menerapkan dan menetapkan program kerja pegawai.

- a. Pengorganisasian adalah sebuah kegiatan untuk mengorganisasi semua pegawai yang menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, integrasi, dan koordinasi dalam bagang organisasi.

- b. Pengarahan merupakan suatu kegiatan yang mengarahkan kepada semua pegawai agar ingin bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien untuk membantu tercapainya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat.
- c. Pengendalian merupakan suatu kegiatan yang dapat mengendalikan semua pegawai, agar dapat mentaati aturan-aturan dan bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Fungsi operasional

- a. Pengadaan yaitu suatu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk memperoleh pegawai yang sesuai dengan kebutuhan organisasi
- b. Pengembangan merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, dan konseptual dan moral karyawan melalui pendidikan.
- c. Kompensasi merupakan pemberian imbalan jasa secara langsung dan tidak langsung dan tidak langsung, uang atau barang kepada pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan organisasi.
- d. Pengintegrasian adalah kegiatan yang dapat mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai.
- e. Pemeliharaan yaitu sebuah kegiatan yang dapat memelihara atau meningkatkan kondisi fisi, mental, loyalitas agar mereka tetap ingin bekerja sama sampai pension.
- f. Kedisiplinan merupakan fungsi manajemen sumber daya manusia yang terpenting dan kunci terwujudnya suatu tujuan karena tanpa disiplin oleh pegawai

- g. Pemberhentian merupakan putusnya hubungan kerja seseorang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Pemberhentian ini umumnya disebabkan oleh keinginan sendiri oleh pegawai.

2.1.6 Pengawasan

2.1.6.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah pengukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diinginkan. Merupakan peran penting dan positif dalam proses manajemen, menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai waktunya. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun (Patiran & Bonsapia, 2018)

Hakikat Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi (Djiloy, 2016)

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diperoleh sebuah konsep pemahaman bahwa sangat perlu dilakukan suatu pengawasan yang berskala dan rutin oleh pemimpin atau orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan sebuah pemantauan, pemeriksaan, penilaian serta perbaikan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.6.2 Teknik Pengawasan

Menurut Simbolong (2004:65) menyatakan bahwa jika tanpa adanya sebuah pengawasan yang baik maka akan menghasilkan suatu tujuan yang kurang

memuaskan, baik di dalam organisasi itu sendiri maupun para pegawainya.

Adapun teknik pengawasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan langsung

Pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh pimpinan pegawai pada setiap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, maka pengawasan dapat dibentuk inspeksi secara langsung serta laporan dari tempat.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak secara langsung merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak yang jauh dengan melalui pelaporan yang dapat dilihat dengan laporan tertulis dan laporan lisan.

Menurut Manullang (2008:184) menyatakan bahwa diperlukan beberapan langkah-langkah pengawasan, terdapat beberapa bentuk pengawasan sebagai berikut :

1. *Standard*

Untuk mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pemimpin haru memiliki standar dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilai standar bagi hasil pekerjaan umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Evaluasi

Dalam melaksanakan sebuah proses pengawasan maka evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan mengevaluasi dimaksud dapat

dibandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat ukur standard yang sudah ditetapkan sebelumnya.

3. *Correctivation*

Dalam melaksanakan tindakan dalam perbaikan maka yang pertama harus dianalisa apa penyebab terjadinya sebuah perbedaan., bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya suatu penyimpangan, maka barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi.

2.1.6.3 Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah bentuk indentifikasi berbagai faktor yang menghambat proses kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang dibutuhkan agar tujuan dapat tercapai (Ramadhani & Setiawan, 2019). Fungsi pengawasan ini sangat diperlukan agar dapat memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan sebagai mestinya. Fungsi pengawasan ini didefinisikan sebagai upaya yang sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar dapat menentukan apakah terdapat sebuah penyimpangan serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun jenis-jenis fungsi pengawasan sebagai berikut :

1. Mempertebal rasa dan tanggung jawab pada pejabat yang diserahi tugas serta wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Mendidik para pejabat agar mereka dapat melaksanakan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Agar dapat mencegah terjadinya suatu penyimpangan, kelalaian, penyelewangan serta kelemahan, agar tidak terjadi suatu kerugian yang tidak diinginkan.
4. Agar dapat memperbaiki kesalahan dan penyelewangan sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak mendapatkan hambatan dan pemborosan

2.1.6.4 Tujuan Pengawasan

(Anisa, 2017) Tujuan pengawasan merupakan untuk mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan agar dapat benar-benar merealisasikan sebuah tujuan, oleh karena itu pengawasan ini terdapat beberapa tujuan sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui sebuah kelemahan-kelemahan serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut diambil suatu tindakan agar dapat memperbaiki baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
2. Agar pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan instruksi pimpinan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2.1.7 Penyerapan Anggaran

2.1.7.1 Pengertian Penyerapan Anggaran

Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. Namun hingga kini, salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah adalah besarnya penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung

jawabkan setiap kegiatan yang telah merupakan akumulasi dari penyerapan anggaran yang dilakukan oleh SKPD (Anisa, 2017)

Penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran). Secara lebih mudah, masyarakat umum menyebutnya pencairan anggaran. Oleh karena yang diamati adalah entitas pemerintahan atau organisasi sektor publik, maka penyerapan anggaran dapat diartikan sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada saat tertentu (Ramadhani & Setiawan, 2019)

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran (Mia et al., 2017)

2.1.7.2 Proses Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014:84) mengemukakan bahwa terdapat dua sudut pandang terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran oleh pemerintah, adapun pendapat terdiri dari :

1. Penyerapan anggaran yang dimaksud yaitu suatu realisasi anggaran pada akhir periode (tahun) dibandingkan dengan anggarannya.
2. Tidak proporsionalitasnya penyerapan anggaran.

(L. Gagola et al., 2017) Efektivitas penyerapan anggaran lebih ditekankan dalam pencapaian segala sesuatu yang dilaksanakan yang berdaya guna berarti tepat, cepat, hemat, dan selamat. Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Tepat adalah apa yang dikehendaki bias tercapai dan kena sasaran memenuhi target dan apa yang diinginkan menjadi realitas.
2. Cepat maksudnya adalah jika pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan.
3. Hemat adalah tidak terjadi sebuah pemborosan dalam bidang apapun dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Selamat dalam hal ini adalah tidak mengalami sebuah hambatan yang dapat mengakibatkan kegagalan sebagian atau seluruh usaha pencapaian tujuan tertentu.

Dalam penelitian ini, penyerapan anggaran merupakan tahap penyusunan dan penetapan anggaran sampai dengan tahap pertanggung jawaban anggaran, pelaksanaan anggaran yang memiliki hubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh para pejabat institusi kementerian Negara/lembaga selaku pengguna anggaran/kuasa anggaran.

2.2 Tinjauan Empiris

Kajian empiris merupakan suatu kajian yang diperoleh dari observasi atau percobaan. Kajian empiris adalah sesuatu informasi yang membenarkan kepercayaan dalam kebenaran atau kebohongan suatu klaim empiris. Dalam pandangan empiris, seseorang hanya dapat mengklaim memiliki pengetahuan saat seseorang memiliki suatu kepercayaan yang benar dilandasi dengan bukti secara empiris. Maksudnya, kajian empiris ialah sama artinya dengan hasil dari suatu percobaan secara ilmiah. Berikut ini sebagai contoh kajian empiris yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tinjauan Empiris

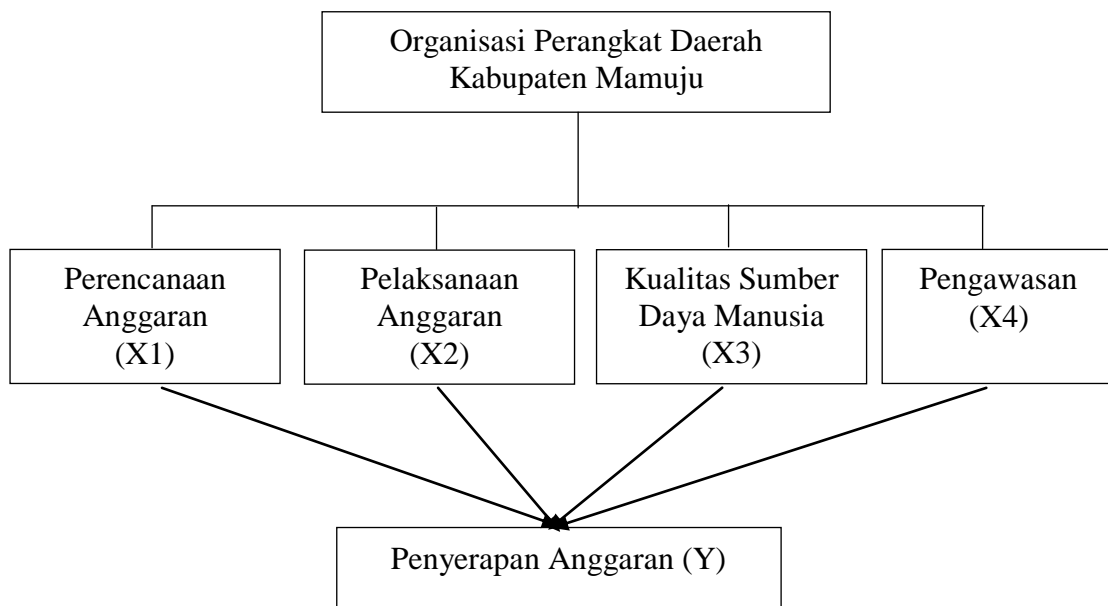
No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Kadek Mia Ranisa Putri, Gede Adi Yuniarta & Made Aristia Prayudi (2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran pada SKPD Pemerintah Povinsi Bali	Hasil penelitian menyatakan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran 2. Variabel sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran 3. Variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran.
2	Dadan Ramdani &Indi Zainur Anisa (2017)	Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten	Hasil penelitiannya adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan perencanaan terhadap penyerapan anggaran 2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas sumber daya manusia terhadap penyerapan anggaran 3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan pelaksanaan anggaran
3	Alimuddin (2018)	Analisis Penyerapan Anggaran Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Dan Kopertis Makassar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran 2. Administrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran 3. Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran 4. Pengadaan barang dan jasa berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran
4	Rahmawati, Amri Amir & Junaidi (2021)	Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan	Hasil penelitian menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran 2. Secara parsial kompetensi sumber daya manusia

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
		Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pada Satuan Kerja Kementerian Agama Republik Indonesia di Kota Jambi	berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran 3. Secara simultan perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran
5	Ledy S. Gagola, Jullie J. Sondakh & Jessy D.L Warongan (2016)	Analisis Faktor-Faktor Penyerapan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Talaud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Besarnya pengaruh kelima variabel tersebut terhadap penyerapan anggaran yang dapat dijelaskan oleh nilai koefisien determinasi adalah sebesar 73,3% sedangkan sisanya 26,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian.

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual adalah bentuk penjelasan terkait dengan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskriptifkan (Sugiyono, 2013). Kerangka konseptual digunakan untuk menunjukkan arah suatu penelitian agar hasil dan tujuan penelitian dapat berjalan pada ruang lingkup yang telah ditetapkan. Terdapat kerangka penelitian pada gambar 1 Kerangka Pemikiran sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Pikir

1. Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Perencanaan menentukan semua aktivitas yang perlu dan akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Teori penetapan

tujuan (*goal setting theory*) menjabarkan bahwa penetapan sasaran yang didukung oleh komitmen dapat mempermudah tercapainya tujuan/sasaran. Penetapan sasaran program yang tepat melalui perencanaan yang optimal dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan. Setiap organisasi yang telah menetapkan sasaran (*goal*) yang diformulasikan ke dalam rencana anggaran lebih mudah untuk mencapai target kinerjanya sesuai dengan visi dan misi organisasi itu sendiri. Sebuah anggaran tidak hanya sekedar mengandung rencana dan jumlah nominal yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan/program, tetapi juga mengandung sasaran yang ingin dicapai organisasi.

2. Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan implemetasi dari perencanaan anggaran yang telah disusun. Faktor terpenting dalam pelaksanaan anggaran adalah proses pelaksanaan anggaran itu sendiri. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, proses pengadaan barang dan jasa, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Ketiga hal tersebut mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Pada teori *agency* peran pelaksanaan anggaran memegang peran penting terutama pada bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya, dimana tempat pelaksanaannya dan siapa yang melaksanakannya sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Semakin baik pelaksanaan anggaran maka penyerapan anggaran akan semakin baik. Hal ini akan mempengaruhi satuan kerja (*agent*) menjalankan tupoksinya sejalan dengan tujuan organisasi dan seperti yang diinginkan masyarakat (*principal*)

3. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia”. Dengan kata lain sumber daya manusia adalah faktor determinan keberhasilan desentralisasi. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sumber daya manusia adalah rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi.

Faktor kunci keberhasilan dalam pengelolaan anggaran adalah staf yang berpengalaman dan mempunyai motivasi. Sumber daya manusia (SDM) menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Kalaupun menggunakan peralatan yang canggih dan handal namun tanpa dibarengi peran aktif sumber daya manusia yang memadai, peralatan tersebut tidak akan bekerja secara maksimal

4. Pengaruh Pengawasan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pengawasan memiliki pengaruh yang penting. Hal ini disebabkan karena dalam pencapaian keberhasilan dibutuhkan pengawasan yang baik dan maksimal.

Pelaksanaan pengawasan keuangan daerah dapat menjadi sarana untuk mengetahui apakah suatu instansi pemerintah telah melakukan pengelolaan secara baik dan benar. Dengan adanya pelaksanaan pengawasan keuangan akan membantu mengontrol pelaksanaan kegiatan pemerintah baik dalam proses

perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban, dengan demikian dapat mencapai keberhasilan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sehingga akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan hasil kesimpulan sementara dari tinjauan teoritis yang mencerminkan antar variabel yang sedang diteliti dan merumuskan hipotesis yang berbentuk alur yang dilengkapi dengan penjelasan kualitatif. Hipotesis merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang diharapkan dan menyangkut hubungan antar variabel penelitian (Setyosari, 2010).

Hipotesis pada penelitian ini dikembangkan oleh peneliti dari hasil telaah teoritis dan penelitian terdahulu sebagai jawaban sementara dari masalah yang diperlukan pengujian dalam bentuk empiris. Oleh karena itu, penelitian mengemukakan hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu :

1. Hipotesis pertama yaitu perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
2. Hipotesis kedua yaitu pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
3. Hipotesis ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.
4. Hipotesis keempat yaitu pengawasan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

5. Hipotesis kelima yaitu perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kualitas sumber daya manusia dan pengawasan secara simultan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

.